



INSTRAN.org - Proyek kereta Mass Rapid Transit (MRT) Kuala Lumpur mulai digagas sejak tahun 2006. Awalnya proyek ini sempat ditolak warga yang tempat tinggalnya dilewati rute MRT, seperti di Jakarta.

Setelah 5 tahun, proyek ini akhirnya mulai kontruksi (ground breaking) pada 8 Juli 2011. Sebelum proses ground breaking, ternyata proyek MRT fase I yang membentang dari Sungai Buloh-Kajang memiliki persoalan serupa dengan proyek MRT Jakarta.

“Itu normal. Selaku pelaksana proyek itu wajar. Kita perlu memberi tahu mereka apa yang berlaku. Ada pembebasan tanah dan kita negosiasi. Saat lakukan public display (dengar pendapat dengan masyarakat), minimum 3 bulan untuk orang berikan respons dan masukan. Hasilnya 90% setuju dan 10% menolak (proyek MRT),” kata Pelaksana Harian CEO MRT Corp Haris Fadzilah Hassan di Pusat Informasi MRT Corp di Kuala Lumpur, Kamis (23/1/2014).

Ada masyarakat yang setuju pembangunan MRT namun enggan rumahnya dilalui proyek MRT. Bahkan ada cerita ekstrim saat petugas lapangan melakukan survey rute.

“Awal 2010. Kita berjumpa orang (masyarakat). Orang kita dikejar pakai parang,” sebutnya. Kondisi mirip di Jakarta juga dijumpai saat pembangunan terowongan MRT untuk rute bawah tanah di Jalan Danau Sultan. Ada beberapa warga yang menolak tanahnya di lewati terowongan MRT.

Penolakan ini merujuk pada undang-undang pertanahan di Malaysia yang menyebutkan tanah yang dimiliki warga, tidak hanya di permukaan tetapi hingga ke bawah. Artinya ketika proyek MRT melewati bawah rumah warga, MRT Corp selaku pelaksana proyek wajib melakukan pembelian tanah.

“Ada 23 rumah di Danau Sultan. Itu sama MRT Jakarta punya Fatmawati dan Lebak Bulus. Sekitar 20 dari 23 setuju, akhirnya kita ambil dan beli. Nanti tanahnya kita jual lagi karena kita nggak perlu,” jelasnya.

Melalui pendekatan personal, akhirnya dilakukan negosiasi dan perjanjian tertulis. Isinya pemilik tanah mengetahui di bawah rumahnya dilalui MRT dan ketika akan membangun rumah tingkat atau mengubah fondasi bangunan harus berkonsultasi dengan MRT Corp.

Hal senada juga terjadi pada area Stasiun Bukit Bintang Sentral. Awalnya terjadi penolakan pemilik bangunan, namun setelah dilakukan pendekatan akhirnya warga setuju.

Untuk melibatkan warga pada proyek MRT ini, otoritas Malaysia mendengar aspirasi masyarakat terhadap rencana pembangunan moda transportasi kereta modern ini. Dari masukan selama 3 bulan sebelum proyek dimulai, terdapat beberapa 13 titik berupa rute dan stasiun yang mengalami perubahan. Termasuk memasang pelindung di area perumahan atau pusat keramaian agar proyek MRT tidak mengganggu aktivitas warga.

“Setiap malam kita engagement satu per satu. Line belum dikonstruksi bisa diubah. Ada 13 titik berubah,” terangya.

Sumber Berita: Detik.com, Kamis, 23/01/2014 11:05 WIB

<http://finance.detik.com/read/2014/01/23/110508/2475726/4/2/seperti-di-jakarta-mrt-kuala-lumpur-sempat-ditolak-warga>